



Prosedur Operasional Standar (POS)

PEMBAYARAN GAJI PNS dan Non PNS

No. 28/IT1.B06/OT.02/2024

Institut Teknologi Bandung
2024

Prosedur Operasional Standar (POS)



PEMBAYARAN GAJI	Nomor : 28/IT1.B06/OT.02/2024 Revisi Ke : - Berlaku TMT : 25 November 2024 Halaman : 1 dari 8
------------------------	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Direktur Kepegawaian  Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. NIP 19700430 199602 2 001	 Direktur Perencanaan Sumber Daya  Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 25 November 2024	Tgl. 27 November 2024

Disetujui oleh:
 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 28 November 2024

Logo of Institut Teknologi Bandung INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		Nomor SOP : 28/IT1.B06/OT.02/2024 Tanggal Pembuatan : 25 November 2024 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : 25 November 2024 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Prof. Muhammad Abduh, Ph.D. NIP 196908151995121002 Nama POS PEMBAYARAN GAJI
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB; 5. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung. 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahu 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011. 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan PP Nomor 27 Tahu 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 178C/IT1.A/PER/2022 tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung.		Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami alur prosedur pembayaran gaji Pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Bandung 2. Memahami proses pengajuan usulan Gaji Pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Bandung 3. Melakukan proses usulan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Keterkaitan: 1. Peraturan yang berlaku terkait Pembayaran Gaji 2. Sistem Penggajian PNS dan Non PNS	Peralatan/Perlengkapan: 3. Perangkat Keras : Komputer / Laptop 4. Jaringan Internet
Peringatan: 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan: Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

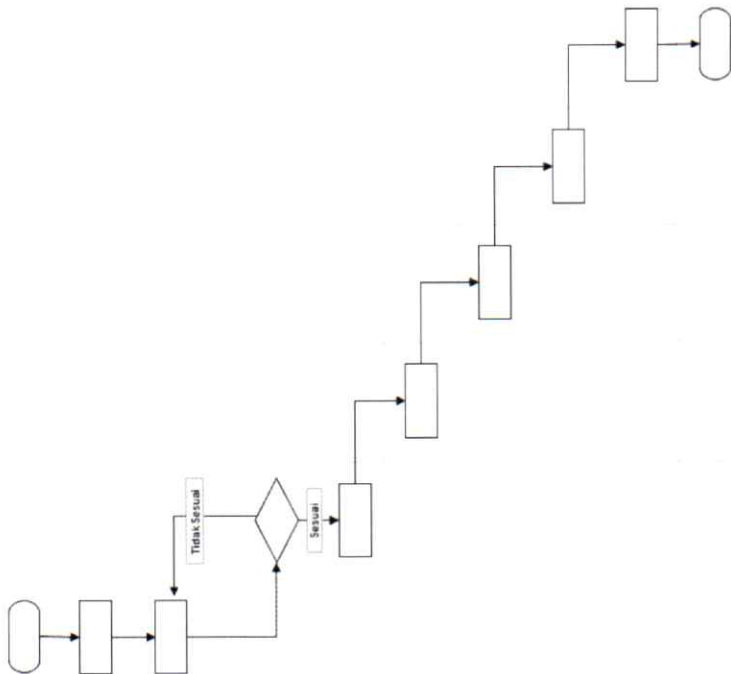
Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai PNS Institut Teknologi Bandung

Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai PNS

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sisfo Kepegawaian	Remunerasi	KPPN	Direktorat Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)
1	Pemutakhiran data pada sistem informasi HRIS				SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	10 Menit	Data	
2	Verifikasi SK dan kelengkapannya, Status Pegawai Aktif dan Status KP4 Pegawai				SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	10 Menit	Data	
3	Pemutakhiran data pegawai pada aplikasi Gaji Web PNS sesuai dengan SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP dan KP4 terbaru Pegawai PNS				SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	10 Menit	Perubahan status pada Aplikasi Gaji Web	
4	Pengecekan status pegawai terupdate setiap bulannya				Data pada Sistem	5 Menit	Memastikan data sudah sesuai dan termutakhirkan	
5	Pengajuan Usulan Pembayaran Gaji Pegawai PNS pada aplikasi Gaji Web				Berkas usulan komponen Gaji Induk	1 Hari	Surat Permohonan Pembayaran	Penolakan biasanya dikarenakan beberapa alasan diantaranya perbedaan Nama pegawai pada usulan dan aplikasi (Penambahan gelar), perubahan tunjangan keluarga tertanggung, dan pegawai Pensiun.
6	Rekonsiliasi dan Validasi pada Aplikasi Gaji Web				Berkas usulan komponen Gaji Induk	1 Hari	Surat Permohonan Pembayaran	Penolakan biasanya dikarenakan beberapa alasan diantaranya Perbedaan data SK, pegawai CPNS yang belum didaftarkan sebagai supplier baru pada aplikasi, dan adanya perubahan data pegawai seperti perubahan nomor rekening/ NIP/ NPWP dan status pensiun.
7	Pembuatan Usulan Gaji pada Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)				Berkas usulan komponen Gaji Induk	1 Hari	Surat Permohonan Pembayaran	Penolakan biasanya dikarenakan adanya error pada aplikasi
8	Pembuatan SPM ke Dit. Keuangan				Berkas Surat Permohonan Pembayaran	1 Hari	Surat Perintah Membayar	
9	Proses Verifikasi oleh Bendahara Pengeluaran di Dit.Keuangan				Surat Perintah Membayar	1 Hari	Surat Perintah Membayar	
10	Proses Approval PPSPM oleh Direktur Keuangan				Surat Perintah Membayar	1 Hari	Surat Perintah Membayar	
11	Proses SP2D di KPPN				Surat Perintah Membayar	1 Hari	Surat Perintah Pencairan Dana	Penolakan biasanya dikarenakan alasan Bank (Norek atau Nama Pemilik Norek harus sama) dan Retur apabila Penerima Melakukan Pemblokiran Rekening ybs.
12	Proses Penerbitan SP2D dan Pencairan dari Bendahara Umum Negara ke Pegawai				Surat Perintah Pencairan Dana	1 Hari	Surat Perintah Pencairan Dana	

Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai Non PNS Institut Teknologi Bandung

Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai NON-PNS

No	Langkah Kegiatan	pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Direktorat Kepegawaian					Direktorat Keuangan	kelengkapan	Waktu		keluaran (Output)
		Sisfo Kepegawaian	Bagian Verifikasi dan Remunerasi	Direktur Kepegawaian	Validator Pajak (Kasubdit Remunerasi)	Bagian Anggaran Belanja Pegawai					
1	Pemutakhiran Data pada Sistem Informasi HRIS						SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	1 Hari	Data		
2	Verifikasi SK dan Kelengkapannya, Status Pegawai Aktif dan Status KP4 Pegawai							SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	1 Hari	Data	
3	Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi HRIS Sesuai dengan SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP dan KP4 Terbaru Pegawai NON-PNS							SK Pengangkatan/ SK KGB/ SK KP, Formulir KP4	1 Hari	Perubahan status pada Aplikasi HRIS	
4	Simulasi Pembayaran Gaji Pegawai NON-PNS pada Aplikasi HRIS dan Verifikasi Hasil Simulasi							Data Golongan/Gapok Termutakhir	10 Menit	Realisasi Anggaran Gaji Induk	
5	Pengajuan Pembayaran Gaji Induk di Aplikasi HRIS							Data Pengajuan Pembayaran	1 Hari	Data Pengajuan Pembayaran	
6	Persetujuan Pengajuan Pembayaran Gaji Induk di Aplikasi HRIS							Data Pengajuan Pembayaran	1 Hari	Data Pengajuan pembayaran	
7	Perhitungan Pajak dan Pembuatan Invoice di Aplikasi HRIS							Data Pengajuan pembayaran	1 Hari	Data Invoice dan File Pendukung Persetujuan pembayaran	
8	Pengiriman Invoice pada aplikasi sistem Keuangan							Surat Permohonan pembayaran dan Kelengkapan Usulan Data Invoice dan File Pendukung Persetujuan pembayaran	1 Hari	Data Invoice dan File Pendukung Persetujuan pembayaran	
9	Proses Verifikasi oleh Bagian Monev di Direktorat Keuangan							Data Invoice dan File Pendukung Persetujuan pembayaran	1 Hari		
10	Proses Pencairan dari Bendahara ke Pegawai									Pencairan Gaji	

I. TUJUAN

Tujuan dari POS ini adalah untuk memberikan panduan terkait Prosedur Pembayaran Gaji Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Gaji** adalah upah kerja atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.
2. **Gaji Induk** adalah Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. **SK Pengangkatan** adalah dokumen surat resmi yang menjadi bukti sah sebagai keterangan pengangkatan seorang pegawai dengan status kepegawaian tetap bagi pegawai yang telah melewati masa percobaan.
4. **SK KGB** adalah dokumen surat resmi terkait kenaikan gaji berkala yang diberikan kepada pegawai PNS maupun Non PNS apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah mencapai masa kerja setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. **SK KP** adalah dokumen surat resmi terkait Kenaikan pangkat yang merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian baik pegawai PNS maupun Non PNS pada rentan waktu tertentu dengan tujuan sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.
6. **Pensiun atau purnatugas** adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri.
7. **Formulir KP4** adalah dokumen yang diberikan kepada pegawai untuk mengusulkan tunjangan Keluarga (baik tunjangan pasangan maupun tunjangan anak).
8. **Aplikasi Gaji Web** adalah aplikasi berbasis web yang dibuat sebagai pengganti dari aplikasi GPP yang berbasis desktop. Aplikasi Gaji Web digunakan oleh para satuan kerja untuk melakukan perhitungan gaji pokok atas Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran gajinya dibebankan pada DIPA Pemerintah Pusat.
9. **Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)** adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
10. **Surat permohonan pembayaran** adalah surat resmi yang ditulis ketika seseorang belum menerima pembayaran dari seseorang / organisasi.
11. **Direktorat Keuangan ITB** adalah unit kerja di ITB yang merupakan unit pelayanan yang diberi amanah untuk mengelola keuangan.
12. **KPPN** adalah kepanjangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang merupakan instansi pemerintah bertugas dengan kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga lain ataupun di bawah kementerian keuangan sendiri.
13. **SPM** adalah kepanjangan dari Surat Perintah Membayar yang merupakan dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. **SP2D** adalah kepanjangan dari Surat Perintah Pencairan Dana yang merupakan salah satu kelengkapan berkas yang penting terutama untuk ranah perkantoran yang berfungsi sebagai syarat dalam pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
15. **HRIS** adalah kepanjangan singkatan dari Human Resource Information System Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yaitu sistem informasi yang membantu pengelolaan sistem dan administrasi kepegawaian meliputi antara lain data pegawai dan remunerasinya agar menjadi lebih efektif dan efisien.

16. **Invoice** adalah fitur pada aplikasi Oracle Fusion yang memuat dokumen yang digunakan untuk mengajukan usulan pembayaran termuat didalamnya kode akuntansi sesuai dengan jenis belanja dari suatu pengajuan, yang juga menunjukkan catatan detail transaksi.
17. **Oracle Fusion** adalah aplikasi sistem yang terintegrasi yang mengotomatiskan proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan penyediaan dan asset.

B. BATASAN

1. POS ini mengatur prosedur pembayaran gaji pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
2. Surat Keputusan dan aturan berlaku menjadi dasar pengajuan usulan gaji pegawai PNS dan Non PNS.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pembayaran gaji yang akurat dan tepat kepada para pegawai baik PNS maupun Non PNS sesuai dengan hak dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.